

Arahan Zonasi Minapolitan Dalam Meningkatkan Perekonomian Kota Pesisir (Studi Kasus: Kota Palopo)

Regita Chahyani A. Gani¹⁾, Slamet Trisutomo²⁾, dan Sri Aliah Ekawati³⁾

¹⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: Chahyaniregita@gmail.com

²⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: trisutomo@gmail.com

³⁾Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin. Email: aliah.sriekawati@gmail.com

ABSTRACT

Palopo is a coastal city that has experienced excessive exploitation of fishery resources and decreased income from the fisheries sector. This condition does not support the realization of the minapolitan vision as stipulated in the Palopo City Spatial Planning (RTRW). This study aims to determine the potential and problems related to fishery resources, human resources, facilities, infrastructure and the level of vulnerability to natural disasters, as well as to recommend minapolitan zoning directions in the coastal area of Palopo City in improving the regional economy. The method used is descriptive qualitative analysis, Location Quotient (LQ), employment, Likert scale and spatial. This research took place from October 2019-March 2020. This research is located in Palopo City. The results showed that fishery resources in Palopo City experienced a decline in production due to an increase in population. Of the five coastal districts, three of them have a capture fishery base and two are aquaculture, but the highest fishery production currently is the aquaculture sub-sector. The aspect of human resources shows that 70% of the total population of each sub-district is a ready-to-work population with the largest number of fishermen in the East Wara District. The facilities and infrastructure in this city have a sufficient level of availability of fishery facilities at this time. The location that has a low level of natural disaster vulnerability is Wara Timur District. In improving the fishery sector in this city, zoning in the coastal area is divided into three parts, namely the core, support and marketing zones.

Keywords: Zoning, fisheries, minapolitan, Spatial, Palopo.

ABSTRAK

Palopo adalah kota pesisir yang mengalami eksploitasi sumber daya perikanan secara berlebihan dan penurunan pendapatan sektor perikanan. Kondisi ini tidak mendukung perwujudan visi minapolitan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi dan masalah terkait sumber daya perikanan, sumber daya manusia, sarana, prasarana dan tingkat kerentanan bencana alam, serta merekomendasikan arahan zonasi minapolitan di kawasan pesisir Kota Palopo dalam meningkatkan perekonomian daerah. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, *Location Quotient* (LQ), ketenagakerjaan, skala *likert*, dan spasial. Penelitian ini berlangsung sejak Bulan Oktober 2019-Maret 2020. Penelitian ini berlokasi di Kota Palopo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya perikanan di Kota Palopo mengalami penurunan produksi yang disebabkan meningkatnya angka kependudukan. Dari lima kecamatan pesisir tiga diantaranya memiliki basis perikanan tangkap dan dua perikanan budidaya, namun produksi perikanan tertinggi saat ini adalah sub sektor perikanan budidaya. Aspek sumber daya manusia menunjukkan 70% dari total penduduk masing-masing kecamatan merupakan penduduk siap kerja dengan jumlah nelayan terbanyak berada di Kecamatan Wara Timur. Sarana dan prasarana di Kota ini memiliki tingkat ketersediaan fasilitas perikanan yang cukup memadai saat ini. Adapun lokasi yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam rendah adalah Kecamatan Wara Timur. Dalam meningkatkan sektor perikanan di kota ini, maka dilakukan pembagian zonasi di kawasan pesisir menjadi tiga bagian yakni zona inti, pendukung, dan pemasaran.

Kata kunci: Zonasi, Perikanan, Minapolitan, Spasial, Palopo.

PENDAHULUAN

Kota Pesisir adalah kawasan yang secara geografis letaknya berbatasan langsung dengan wilayah

perairan. Kota pesisir di Indonesia termasuk diantaranya Palopo merupakan salah satu penggerak ekonomi negara karena memiliki

kelimpahan sumber daya laut yang bernilai ekonomi tinggi (Lasabuda, 2013). Pengelolaan sumber daya laut akan memacu pembangunan ekonomi lebih tinggi, inklusif, dan berdaya saing (RPJMN Tahun 2020-2024). Pembangunan ekonomi yang optimal tidak hanya bergantung pada melimpahnya sumber daya perikanan namun harus dibarengi dengan konsep perencanaan yang sistematis. Sebelum ditetapkannya Kota Palopo sebagai ibu kota provinsi, daerah ini dikenal dengan sumber daya ikan yang melimpah, namun tingginya tingkat urbanisasi di kota ini memicu eksploitasi akan sumber daya perikanan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya.

Bencana alam menjadi salah satu ancaman bagi kota-kota yang berada di kawasan pesisir. Bencana alam yang terjadi di kawasan pesisir dapat merusak sarana dan lingkungan (Artiani, 2011). Salah satu konsep pengelolaan kota pesisir adalah minapolitan. Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi kota pesisir berbasis perikanan atas dasar prinsip terintegritas, efisiensi, berkualitas, dan percepatan (Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No. 12 Tahun 2010).

Ditinjau dari aspek geografis, kota ini terletak tepat berhadapan dengan Teluk Bone (BPS, 2019). Luas wilayah Kota Palopo sebesar 62% merupakan dataran rendah pesisir (APEKSI, 2019). Berdasarkan hasil observasi awal, kota ini tidak mampu memenuhi konsumsi perikananannya dan bagian pesisir kota setiap tahunnya mengalami bencana alam.

Kota Palopo selalu mengandalkan hasil *import* dari daerah lain sebesar 30% dari total kebutuhannya. Tidak adanya penetapan zonasi minapolitan di kawasan ini lebih memperkeruh perekonomian kota. Sektor perikanan Kota Palopo mengalami penurunan dan tidak menjadi basis pendapatan daerah (Statistik Perekonomian Kota Palopo Tahun 2019).

Kondisi Kota Palopo saat ini, berbanding terbalik dengan rencana pengembangannya. Sebagai kota pesisir, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2012-2032 menetapkan Kota Palopo sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi minapolitan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan arahan zonasi minapolitan di kawasan pesisir Kota Palopo dalam meningkatkan perekonomian daerah. Arahan zonasi ini diperoleh dari faktor produksi ekonomi yang meliputi potensi perikanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta faktor hambatan dari aspek kebencanaan alam.

Diharapkan dengan adanya arahan zonasi minapolitan di kawasan pesisir Kota Palopo dapat meningkatkan perekonomian kota, mencegah adanya eksploitasi sumber daya berlebih namun mampu memenuhi permintaan yang ada serta tanggap terhadap bencana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang berlokasi disepanjang kawasan pesisir Kota Palopo yang meliputi Kecamatan Telluwanua, Bara, Wara Utara, Wara Timur dan Wara Selatan. Penelitian ini berlangsung dari Bulan Oktober 2019 hingga Maret 2020. Adapun metode yang digunakan dalam setiap variabel penelitian sebagai berikut.

Analisis Sumber Daya Perikanan

Sumber daya perikanan dianalisis untuk dapat mengetahui kondisi eksisting perikanan di Kota Palopo saat ini. Teknik analisis yang digunakan adalah *Location Qoutient* (LQ). Teknik analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui sektor basis dari kelima kecamatan pesisir yang ada di Kota Palopo. Berikut formula LQ (Mulyawan, 2015).

$$LQ = \frac{X_a/X_a'}{X_b/X_b'} \quad (1)$$

Keterangan:

- X_a = Produksi sub sektor perikanan kecamatan;
- X_a' = Produksi sektor perikanan kecamatan;
- X_b = Produksi sub sektor perikanan kota;
- X_b' = Produksi sektor perikanan kota.

Analisis Sumber Daya Manusia

Analisis sumber daya manusia dalam penelitian ini meliputi karakteristik penduduk dan tenaga kerja yang tersedia dimasing-masing kecamatan pesisir. Karakteristik masyarakat diperoleh dari hasil wawancara dan observasi langsung, kemudian untuk ketersediaan tenaga kerja dilihat dari Angka Partisipasi Tenaga Kerja (APTK) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). APTK bertujuan

untuk mengetahui jumlah penduduk usia produktif yang berkisar 15-64 tahun. Interpretasi APTK, jika hasilnya diatas 50% menandakan tingkat partisipasi yang tinggi. Berikut formula APTK (Arifin, 2016).

$$\text{APTK} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\% \quad (2)$$

TPAK adalah indikator yang menunjukkan jumlah penduduk yang telah terserap oleh lapangan pekerjaan. Berikut ini formula TPAK.

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Usia Kerja}} \times 100\% \quad (3)$$

Interpretasi dari formula ini yakni TPAK > 70% tinggi, TPAK = 51-60% sedang, dan TPAK < 50%, rendah.

Analisis Sarana Minapolitan

Analisis sarana minapolitan ini mengacu pada pedoman perencanaan pengembangan kawasan perikanan (Departemen Perindustrian, 2009). Saran penunjang minapolitan menggunakan teknik analisis skala *likert*.

Teknik analisis skala *likert* bertujuan untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan kondisi dari sarana yang ada berdasarkan hasil pembobotan dengan bobot tertinggi yaitu lima dan terendah yaitu satu. Berikut formula skala *likert* (Lataena, 2019).

$$\text{Rumus Index \%} = \frac{\text{Total Skor Indikator}}{\text{Total Skor Indikator}} \times 100\% \quad (4)$$

Keterangan:

Angka 0% - 19.99%	= Sangat buruk
Angka 20% - 39.99	= Kurang baik
Angka 40% - 59.99%	= Cukup
Angka 60% - 79.99%	= Baik
Angka 80%- 100%	= Sangat baik

Analisis Jaringan Jalan dan Titik Terminal

Prasarana pendukung dalam penelitian ini menggunakan komponen jaringan jalan dan titik terminal. Adapun teknik analisis yang digunakan berupa analisis deskriptif dan spasial untuk melihat kondisi jaringan jalan dan titik lokasi terminal di lima kecamatan pesisir. Analisis ini bertujuan untuk memudahkan proses distribusi hasil produksi.

Analisis Riwayat Kebencanaan

Analisis riwayat kebencanaan dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengarahkan penetapan zona minapolitan nantinya untuk

menggambarkan tingkat kerentanan bencana disetiap kecamatan pesisir (Artiani, 2011).

Analisis Penetapan Zona Minapolitan

Analisis spasial digunakan untuk mengeksplorasi data melalui perspektif keruangan untuk penetapan zona minapolitan. Data yang digunakan yaitu hasil *overlay* dari data sumber daya perikanan, sumber daya manusia, riwayat kebencanaan, sarana, dan prasarana serta mengacu pada klasifikasi zona pemanfaatan ruang minapolitan (Aryunto, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Daya Perikanan

Produksi perikanan Kota Palopo bersumber dari sub sektor perikanan tangkap, perikanan budidaya, dan industri pengolahan ikan yang diperoleh dari penangkapan secara langsung di laut. Pada tahun 2018 produksi perikanan tangkap tertinggi berada di Kecamatan Wara Timur dengan produksi sebesar 7,972.70 ton, sementara hasil produksi terendah berada di Kecamatan Telluwanua sebesar 1,041.50 ton. Sumber produksi lainnya adalah sub sektor perikanan budidaya. Perikanan budidaya meliputi budidaya laut, tambak dan air tawar. Pada tahun 2018 produksi perikanan budidaya tertinggi berada di Kecamatan Wara Timur sebesar 50,699 ton dan terendah berada di Kecamatan Telluwanua sebesar 279.35 ton.

Hasil perikanan budidaya jika ditinjau dari segi luas lahan berbanding terbalik dengan tingkat produksinya. Kecamatan Telluwanua merupakan kecamatan yang memiliki luas lahan tambak terbesar diantara kecamatan lainnya, tetapi memiliki tingkat produksi terendah. Kota Palopo memiliki lima kecamatan pesisir yang berperan dalam memproduksi hasil perikanan. Oleh karena itu untuk mengetahui basis perikanan maka dilakukan analisis sektor basis disetiap kecamatan yang dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.

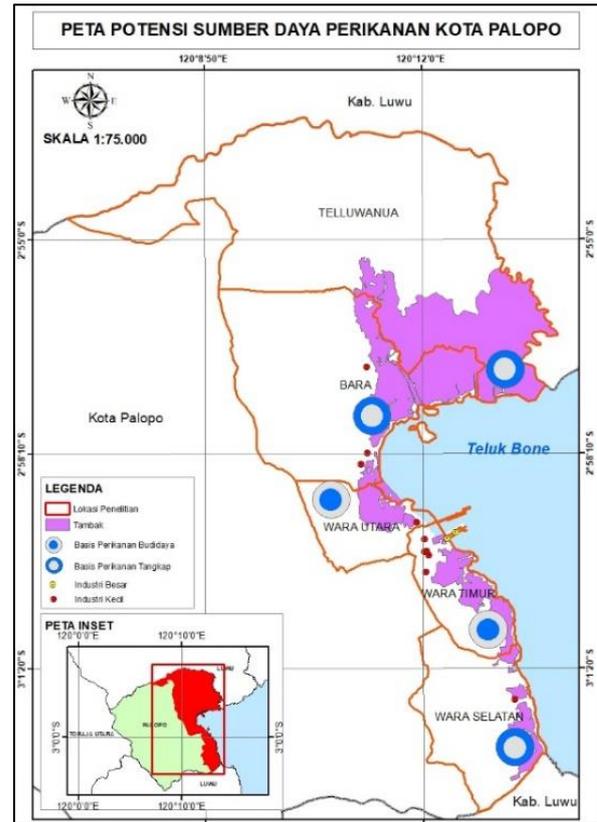
Tabel 1. Nilai LQ sektor perikanan Kota Palopo 2018

Kawasan Pesisir	Nilai LQ	
	Perikanan Tangkap	Perikanan Budidaya
Kec. Bara	6,3	0,1
Kec. Telluwanua	3,4	0,5
Kec. Wara Timur	0,9	1,0
Kec. Wara Selatan	1,6	0,8
Kec. Wara Utara	0,4	1,0

Tabel 1 menunjukkan kawasan yang memiliki basis subsektor perikanan tangkap adalah Kecamatan Bara, Telluwanua dan Wara Selatan dengan nilai LQ melebihi angka satu. Kemudian, untuk subsektor perikanan budidaya merupakan basis dari Kecamatan Wara Utara dan Wara Timur dengan perolehan nilai LQ melebihi angka satu. Interpretasi nilai LQ yang lebih dari angka satu menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap komoditinya serta mampu mengekspor ke daerah lain apabila dilakukan pengembangan yang memadai.

Sumber produksi perikanan di Kota Palopo yang terakhir adalah industri pengolahan hasil perikanan. Industri pengolahan di Kota Palopo umumnya merupakan industri skala kecil dengan pengolahan secara tradisional, yakni melalui proses pendinginan dan pengeringan ikan. Industri-industri kecil ini mengolah hasil perikanan menjadi bentuk olahan teri gurih, ikan teri super, kerupuk ikan, amplang ikan, dan abon ikan.

Saat ini tercatat ada 10 kelompok yang dibina dan tersebar dilima kecamatan pesisir Kota Palopo. Dari sepuluh industri, lima diantaranya berada di Kecamatan Wara Timur. Industri skala besar belum dikembangkan di kota ini. Industri besar yang ada di Kota Palopo merupakan milik investor berupa gudang penyimpanan ikan dan udang. Selanjutnya untuk mengetahui kondisi potensi sumber daya perikanan Kota Palopo secara menyeluruh, maka hasil analisis akan dituangkan dalam bentuk visualisasi pemetaan secara spasial pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Peta sumber daya perikanan Kota Palopo
Sumber: RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032; Ilustrasi dan digitasi potensi oleh penulis, 2020.

Sumber Daya Manusia

Kawasan pesisir Kota Palopo dalam RTRW dicanangkan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) (RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032), sehingga pembangunan fisik di kawasan ini sangat cepat seiring dengan ditetapkannya Kota Palopo sebagai ibu kota provinsi. Kondisi ini sangat mempengaruhi perkembangan penduduknya, terjadi pergeseran pola hidup penduduk dari nelayan ke perindustrian dan jasa, sehingga penduduk asli Kota Palopo beralih profesi ke bidang industri dan jasa. Berdasarkan data tenaga kerja Kota Palopo tahun 2018, 5% penduduk bekerja sebagai nelayan dan 0.1% sebagai petambak dari jumlah seluruh penduduk yang bekerja. Jumlah nelayan dan petambak terbesar berada di Kecamatan Wara Timur, sementara yang terendah berada di Kecamatan Telluwanua.

Sumber daya manusia di Kota Palopo dapat diketahui berdasarkan ketersediaan tenaga kerja yang dilihat dari APTK dan TPAK. APTK kawasan pesisir Rata-rata 70% penduduk disetiap kecamatan pesisir merupakan penduduk siap kerja atau usia produktif. Angka ini menunjukkan nilai yang tinggi, sebab melaumpai batas interpretasi 50%. TPAK menggambarkan rata-rata 40% dari jumlah penduduk siap kerja di masing-masing kecamatan pesisir telah terserap oleh lapangan pekerjaan sehingga masuk dalam kategori rendah. Berikut dapat dilihat dalam Tabel 2 Nilai APTK dan TPAK di kawasan pesisir Kota Palopo.

Tabel 2. APTK dan TPAK kawasan pesisir Kota Palopo

Kecamatan	APTK (%)	TPAK (%)
Wara Utara	70	39
Wara Selatan	68	44
Telluwanua	70	35
Wara Timur	70	43
Bara	70	40

Sumber: Statistik Perekonomian Kota Palopo Tahun 2019; Nilai APTK dan TPAK oleh peneliti, 2020

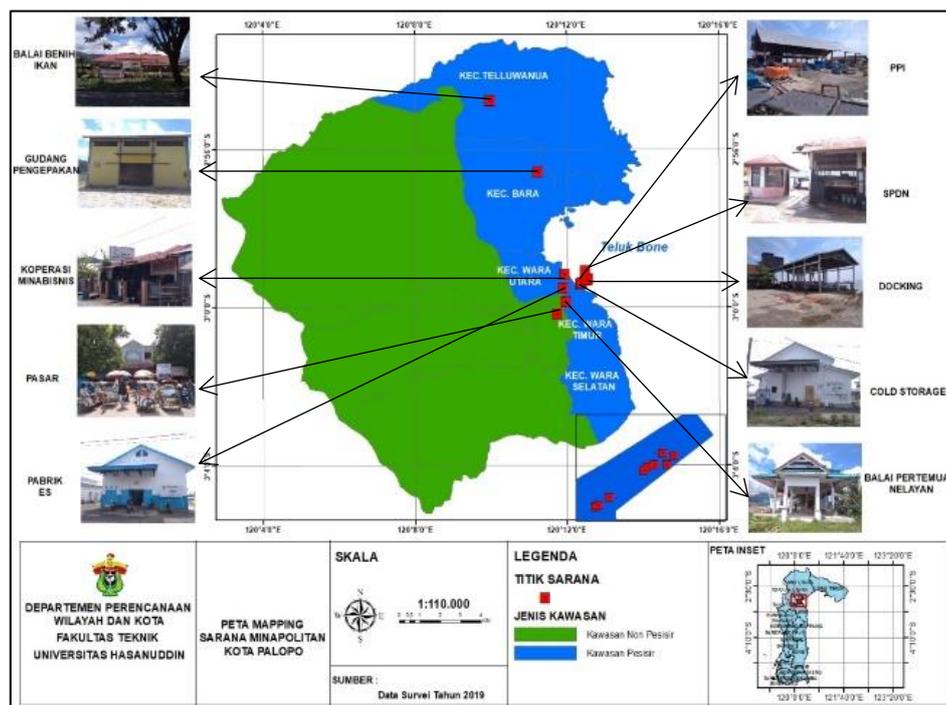
Sarana Minapolitan

Sarana merupakan salah satu fasilitas penunjang untuk mengelolah hasil perikanan guna menambah nilai ekonomi hasil produksi. Penelitian ini mengacu pada pedoman perencanaan pengembangan kawasan minapolitan (Departemen Perindustrian, 2009) dengan menggunakan teknik skala *likert*.

Pada Gambar 2 dapat dilihat visualisasi pemetaan sarana minapolitan Kota Palopo. Berdasarkan analisis skala *likert* diperoleh interpretasi sarana minapolitan kawasan pesisir Kota Palopo, yakni ketersediaanya mencapai 87.6% dengan kategori sangat baik. Jumlah sarana yang terdapat di kawasan pesisir Kota Palopo sebesar 26 bangunan dan 16 diantaranya berada di Kecamatan Wara Timur.

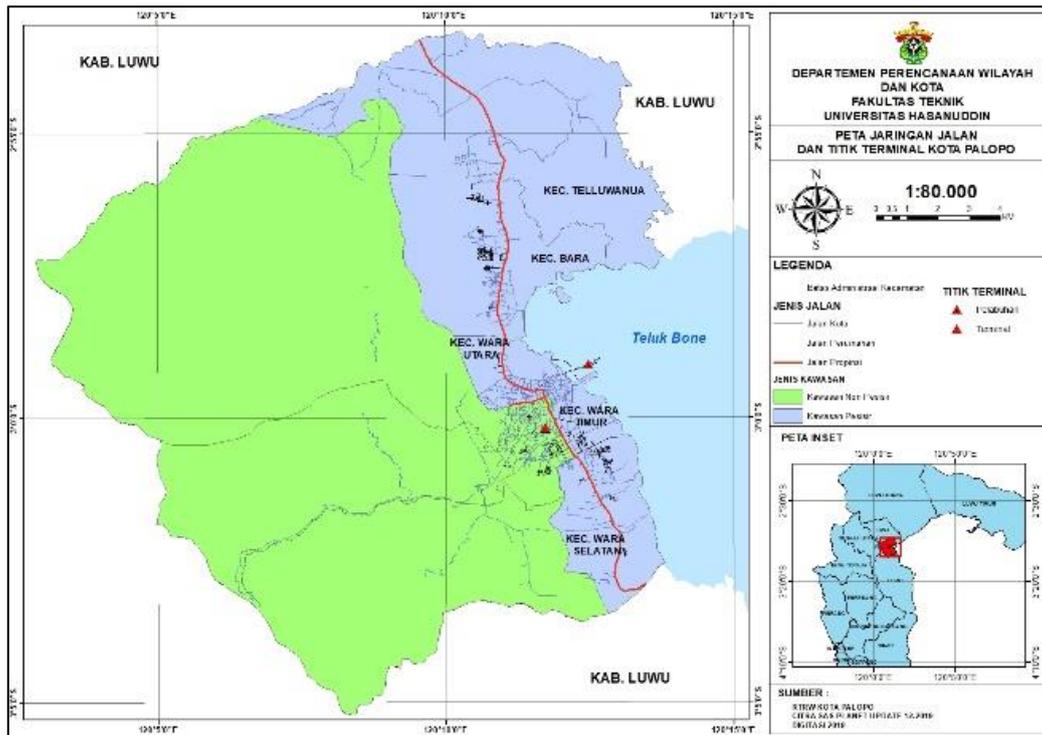
Jaringan Jalan dan Titik Terminal

Jaringan jalan kawasan pesisir Kota Palopo cukup memadai. Kelima kecamatan pesisir dilintasi oleh jalan provinsi atau arteri primer. Secara keseluruhan jaringan jalan disetiap kecamatan pesisir didominasi oleh jenis jalan perkotaan, sehingga memudahkan pergerakan distribusi produksi hasil perikanan. Selain jaringan jalan yang memadai, untuk proses distribusi perikanan Kota Palopo ditunjang dengan adanya terminal. Kota Palopo memiliki dua terminal transportasi yakni pelabuhan dan terminal mobil. Pelabuhan terletak di Kecamatan Wara Timur dan terminal mobil di Kecamatan Wara. Kecamatan Wara merupakan kawasan non pesisir namun berbatasan langsung dengan Kecamatan Wara Timur, sehingga Kecamatan Wara Timur sangat memadai pola distribusi keluar dan kedalam kawasan. Visualisasi kondisi jaringan jalan dan titik terminal Kota Palopo dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.



Gambar 2. Peta mapping sarana minapolitan Kota Palopo

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2012-2032; Ilustrasi dan digitasi titik sarana oleh penulis, 2020



Gambar 3. Peta jaringan jalan dan titik terminal

Sumber: RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032; Ilustrasi dan digitasi titik terminal oleh penulis, 2020

Riwayat Bencana Alam Kawasan Pesisir

Identifikasi riwayat kebencanaan di kawasan pesisir Kota Palopo guna mengetahui tingkat kerentanan bencana dimasing-masing kecamatan pesisir. Secara umum bencana yang rawan terjadi di kawasan pesisir Kota Palopo yakni angin kencang, angin kencang disertai hujan deras, dan pergeseran tanah.

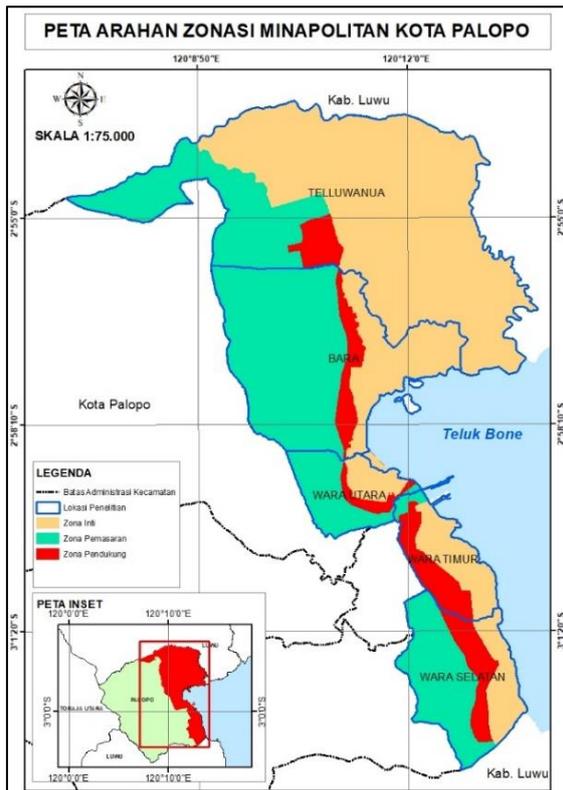
Dari empat jenis bencana yang pernah terjadi, hujan deras merupakan bencana yang melanda setiap kecamatan di kawasan pesisir Kota Palopo. Adapun lokasi yang sangat rawan dan menjadi perhatian khusus yakni Kecamatan Wara Selatan yang rentan ditimpa bencana hujan deras yang disertai angin kencang. Kemudian, Kecamatan Telluwanua rentan akan terjadinya longsor dan banjir akibat hujan deras. Kawasan yang memiliki tingkat kerentanan bencana alam yang rendah adalah Kecamatan Wara Timur.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir Kecamatan Wara Timur memiliki frekuensi terjadinya bencana alam yang rendah (BPBD Kota Palopo Tahun 2016-2019). Dari sudut pandang hambatan ekonomi kebencanaan, jenis-jenis bencana yang terjadi di kawasan pesisir Kota Palopo merupakan kategori *sudden-onset disasters*. *Sudden-onset disasters* adalah jenis bencana alam

yang dapat merusak modal produksi dan infrastruktur, oleh karenanya dalam penetapan kawasan industri besar dianjurkan untuk memilih lokasi dengan tingkat kerentanan bencana alam yang rendah.

Arahan Penetapan Zonasi Minapolitan

Analisis penetapan kawasan zonasi minapolitan di Kota Palopo berdasarkan hasil pertimbangan analisis sumber daya perikanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta tingkat kerentanan bencana alam yang telah dianalisis sebelumnya. Adapun pertimbangan lain dalam penentuan zonasi minapolitan ini, mengacu pada kriteria penelitian sebelumnya (Aryunto, 2016), yang membagi kawasan minapolitan menjadi tiga zona. Pada Gambar 4 dihalaman berikut dapat dilihat penetapan zona minapolitan di Kota Palopo.



Gambar 4. Peta arahan zonasi minapolitan Kota Palopo
Sumber: RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032; Ilustrasi dan digitasi zona oleh penulis, 2020

Zona inti adalah kawasan yang berperan untuk menghasilkan produksi perikanan. Zona inti Kota Palopo direncanakan sepanjang kawasan yang berbatasan langsung dengan bibir pantai. Kriteria inti dari zona ini yakni memiliki sentra produksi perikanan (perikanan tangkap dan budidaya) dan lahan produksi. Produksi perikanan tangkap tertinggi berada di Kecamatan Wara Timur, oleh karena itu daerah ini dijadikan kawasan sentra produksi perikanan tangkap.

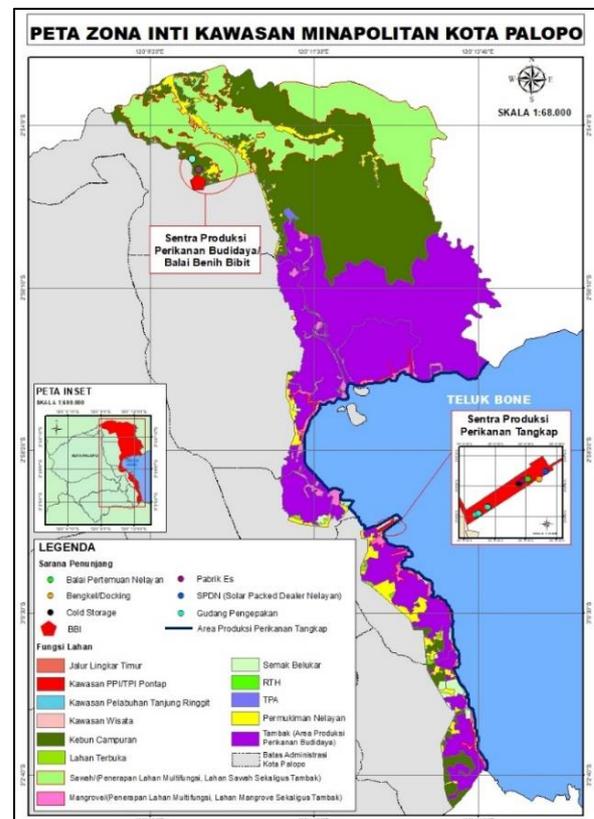
Penetapan sentra produksi ini didukung dengan kondisi eksisting sarana produksi seperti gudang pengepakan, *cold storage*, pelabuhan pendaratan ikan, balai pertemuan nelayan, *docking*, SPDN dan pabrik es yang berada Kecamatan Wara Timur. Lokasi Kecamatan Wara Timur yang berada ditengah antara lima kecamatan pesisir sangat mendukung apabila lokasi sentra produksi perikanan tangkap di kawasan ini.

Sumber penghasil perikanan Kota Palopo lainnya, adalah sub sektor perikanan budidaya. Dari kelima kecamatan pesisir, Kecamatan Telluwanua adalah daerah dengan luas wilayah tambak terbesar sehingga dalam zona inti Kecamatan Telluwanua dijadikan sentra produksi Perikanan Budidaya.

Penetapan lokasi ini didukung dengan adanya sarana Balai Benih Ikan (BBI) yang berada di Kecamatan Telluwanua. Peningkatan produksi sub sektor perikanan budidaya dapat menjadi solusi bagi perekonomian dan fenomena eksploitasi perikanan laut di Kota Palopo.

Upaya peningkatan produksi perikanan budiya di Kota Palopo adalah menambah luas area tambak perikanan dengan cara memultifungsikan pemanfaatan lahan. Dalam upaya ini lahan sawah dan mangrove sangat sesuai untuk peruntukan tambak (Utina, 2018). Upaya ini didukung dengan kondisi eksisting lahan sawah terbesar di Kecamatan Telluwanua, sehingga penempatan sentra produksi perikanan budidaya di kecamatan ini sangat memumpuni.

Adapun dampak positif yang diperoleh dari penetapan sentra produksi perikanan budidaya di Kecamatan Telluwanua yakni membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar, sebab berdasarkan analisis sumber daya manusia Kecamatan ini memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Perencanaan zona inti kawasan minapolitan di Kota Palopo berikut dituangkan dalam visualisasi pemetaan Gambar 5.



Gambar 5. Peta zona inti kawasan minapolitan Kota Palopo
Sumber: RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032; Ilustrasi dan digitasi zona oleh penulis, 2020

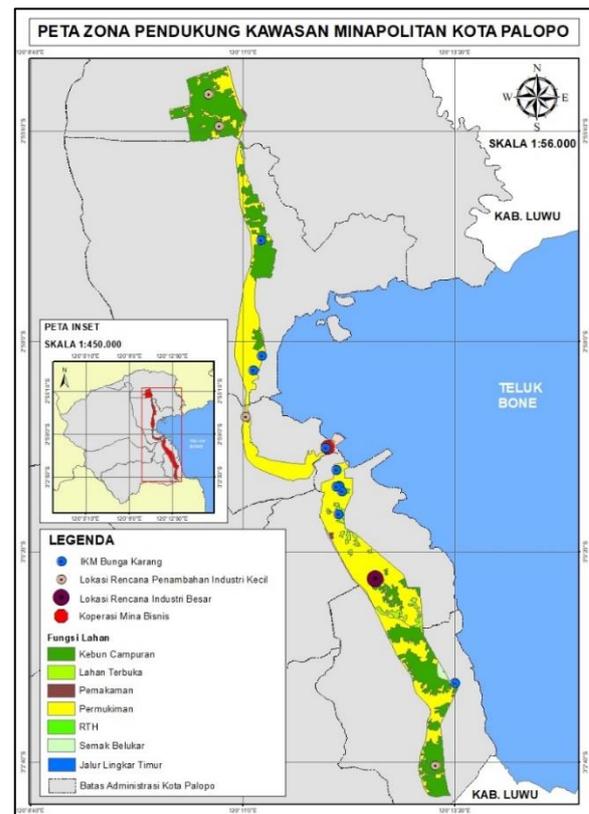
Zona Pendukung adalah kawasan yang berperan untuk mendukung hasil produksi perikanan agar menambah nilai ekonomi. Zona pendukung identik dengan kegiatan pengelolaan hasil perikanan yang ditandai dengan adanya industri. Penetapan zona pendukung di Kota Palopo berdasarkan kondisi eksisting ketersediaan industri pengelolah perikanan.

Guna mendukung upaya peningkatan produksi perikanan di zona inti, maka penambahan jumlah industri pengelolah juga ditingkatkan sehingga hasil produksi perikanan dapat diolah dengan cepat dan tepat. Dalam zona pendukung ini direncanakan penambahan industri pengelolah sebanyak empat industri kecil dan satu industri besar. Keempat industri ini masing-masing direncanakan satu di Kecamatan Wara Selatan, satu di Kecamatan Wara Utara dan dua di Kecamatan Telluwanua.

Kecamatan Wara Selatan dan Wara Utara direncanakan penambahan masing-masing satu industri kecil. Penempatan industri kecil sebab di kecamatan ini hanya memiliki satu industri pengelolah. Kemudian, penambahan dua industri pengelolah di Kecamatan Telluwanua, sebab berdasarkan rencana zona inti Kecamatan Telluwanua diperuntukan sebagai sentra produksi perikanan budidaya, sementara dikawasan ini tidak memiliki satupun industri pengelolah. Penetapan lokasi industri besar di Kecamatan Wara Timur dikarenakan kecamatan ini memiliki tingkat kerawanan bencana alam yang rendah, mengingat industri merupakan infrastruktur perekonomian yang akan berdampak langsung apabila terjadi bencana alam (Sudarya, 2013).

Adapun dampak positif lainnya apabila dibangun industri besar di Kecamatan Wara Timur akan menyerap tenaga kerja. Berdasarkan analisis tenaga kerja, Kecamatan Wara Timur memiliki jumlah nelayan tertinggi namun mengalami penurunan pendapatan dikarenakan adanya eksploitasi perikanan yang berlebih. Jika dibangun industri skala besar dengan memanfaatkan teknologi modern para nelayan dapat berkerja di industri. Kondisi ini sangat menguntungkan terlebih lagi jarak pembangunan industri besar ini dekat dengan pelabuhan dan terminal sehingga memudahkan proses distribusi nantinya. Rencana penetapan zona pendukung

dapat dilihat dalam visualisasi pemetaan Gambar 6 berikut ini.



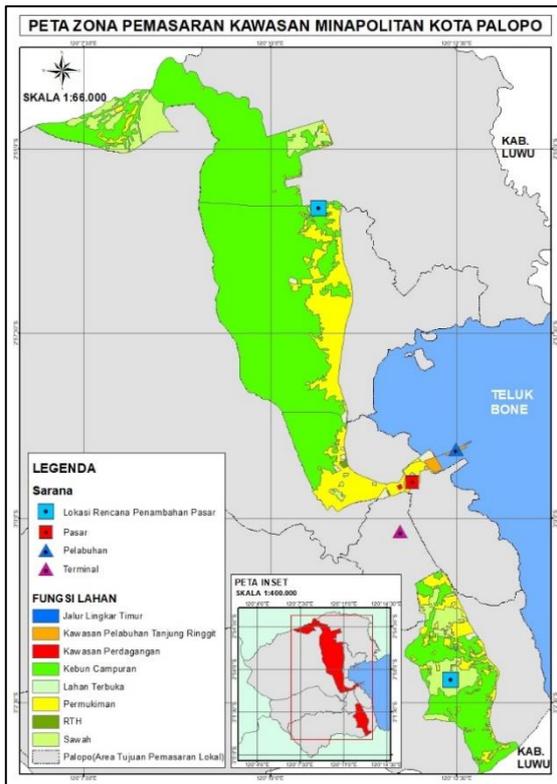
Gambar 6. Peta zona pendukung kawasan minapolitan Kota Palopo

Sumber: RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032; Ilustrasi dan digitasi zona oleh penulis, 2029

Zona pemasaran berperan untuk mendistribusikan hasil pengolahan perikanan dari zona sebelumnya. Secara umum zona pemasaran merupakan seluruh area tujuan distribusi atau daerah yang akan mengkonsumsi hasil perikanan, baik itu dalam Kota Palopo maupun luar. Zona pemasaran ini identik dengan pasar, terminal, dan pelabuhan. Oleh karena itu, dalam penetapan zona pemasaran ini diusulkan pembangunan pasar tambahan.

Kota Palopo berdasarkan kondisi eksisting hanya memiliki satu pasar ikan, sehingga dalam zona ini diusulkan penambahan dua pasar. Satu pasar di Kecamatan Telluwanua dan satunya lagi di Kecamatan Wara Selatan. Penempatan pasar ini direncanakan guna memudahkan akses distribusi. Pasar ikan yang telah ada berfungsi untuk pendistribusian ke bagian tengah kota sebab pasar ini terletak di Kecamatan Wara Timur yang berada di tengah kota. Penambahan dua pasar baru di Kecamatan Telluwanua dan Wara Selatan diharapkan mampu mendistribusikan hasil perikanan

pada bagian utara dan selatan Kota Palopo. Berikut dapat dilihat pada Gambar 7 visualisasi zona pemasaran di Kota Palopo.



Gambar 7. Peta zona pemasaran kawasan minapolitan Kota Palopo

Sumber: RTRW Kota Palopo Tahun 2012-2032; Ilustrasi dan digitasi zona oleh penulis, 2020

KESIMPULAN

Potensi dan permasalahan di kawasan pesisir Kota Palopo dapat dilihat dalam beberapa aspek yaitu: 1) sumber daya perikanan di Kota Palopo meliputi sub sektor perikanan tangkap dan budidaya. Analisis LQ menunjukkan, tiga diantara kecamatan yang berlokasi di kawasan pesisir merupakan daerah basis perikanan tangkap yakni Kecamatan Telluwanua, Bara dan Wara Selatan, serta basis untuk perikanan budidaya di Kecamatan Wara Timur dan Wara Utara. Produksi sub sektor perikanan budidaya memiliki produksi tertinggi dengan luas lahan terbesar berada di Kecamatan Telluwanua. Penurunan produksi perikanan tangkap dikarenakan adanya eksploitasi sumber daya perikanan yang memicu peningkatan pertumbuhan penduduk di Kota Palopo. Hal inilah yang mengakibatkan penurunan produksi perikanan Kota Palopo; 2) sumber daya manusia di kawasan pesisir Kota Palopo dahulunya merupakan mayoritas nelayan, namun setelah Kota Palopo mengalami perkembangan menjadi ibu kota provinsi sebagian

besar penduduk beralih profesi ke bidang industri dan jasa. Saat ini jumlah nelayan terbanyak berada di Kecamatan Wara Timur dan terendah di Kecamatan Telluwanua.

Berdasarkan analisis ketenagakerjaan masing-masing kecamatan pesisir memiliki penduduk siap kerja rata-rata sebesar 70% dengan perbandingan 40% terserap oleh lapangan pekerjaan dan 30% pengangguran. Kondisi inilah salah satu pemicu menurunnya perekonomian sektor perikanan Kota Palopo; 3) Aspek sarana Kota Palopo berdasarkan analisis skala *likert* memiliki tingkat ketersediaan diatas 80% dengan kategori kondisi yang baik; 4) Aspek prasarana yang ditinjau dari jaringan jalan dan titik terminal, kawasan pesisir Kota Palopo cukup memadai untuk kegiatan pola distribusi produk. Hal ini dikarenakan kelima kecamatan yang berada di kawasan pesisir dilintasi oleh jaringan jalan arteri primer dan sebagian besar jaringan jalan kota dengan lebar jalan sampai dengan 5 meter. Pendistribusian dikawasan ini juga dipermudah dengan adanya titik terminal bus dan pelabuhan regional yang berada di tengah kota; 5) Dari aspek kerentanan bencana alam, masing-masing kecamatan memiliki kerentanan bencana yang berbeda, namun Kecamatan Wara Timur memiliki tingkat kerentan yang rendah.

Sehingga sangat memadai apabila dilakukan pengembangan kawasan industri di daerah ini. Penetapan zonasi di kawasan pesisir Kota Palopo dibagi dalam tiga bagian yakni zona inti atau produksi, pendukung, dan pemasaran. Konsep yang diusulkan dalam penetapan kawasan ini yakni adanya rencana penambahan luas wilayah tambak yang disertai dengan penambahan sarana penunjangnya. Penambahan luas wilayah diarahkan dengan memultifungsikan lahan sawah dan *mangrove* untuk area penambakan. Penambahan luas area tambak selain dapat meningkatkan produksi perikanan juga dapat menyerap tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Asfihannur dan Muhamad Roem. (2016). *Kajian Strategis Pembangunan Ekonomi Wilayah Pesisir Kecamatan Tanjung Palas Timur*. Jurnal Harpodon Borneo, 9(1): 20-31.
- Artiani, Listya Endang. (2011). *Dampak Ekonomi Makro Bencana Interaksi Bencana dan Pembangunan Ekonomi Nasional*. Seminar Nasional Informatika. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional.
- Aryunto, Primus. (2016). *Konsep Pengembangan Kawasan Pesisir Perkotaan Maumere Sebagai Kawasan Minapolitan Kabupaten Sikka (Studi Kasus: Kecamatan Alok Barat)*. Tesis Manajemen Pembangunan Kota. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). (2019). *Hasil Rapat Kerja Tahunan Tahun 2019*. Palopo: Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).
- Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palopo Tahun 2016-2019.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palopo. (2019). *Kota Palopo Dalam Angka Tahun 2019*.
- Departemen Perindustrian. (2009). *Roadmap Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut*. Jakarta: Direktorat Jendral Agro dan Kimia.
- Dinas Pekerjaan Umum Kota Palopo. (2012). *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo Tahun 2012-2032*.
- Persandian dan Statistik Kota Palopo. (2019) Statistik Perekonomian Kota Palopo.
- Lasabuda, Ridwan. (2013). *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Prespektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*. Jurnal Ilmiah Platax, 1(2): 92-101.
- Lataena, Desti Rahayu. (2019). *Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Studi Kasus: Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Mulyawan, Tb Iwan et al. (2015). *Potensi Ekonomi dan Arahan Pengembangan Perekonomian Wilayah di Desa-desa Penyangga Taman Nasional Ujung Kulon*. Jurnal J. Tanah Lingkungan, 17(1): 25-32.
- Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan No. 12. (2010). *Minapolitan*.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
- Sudarya, Dudu et al. (2013). *Analisis Perkembangan Ekonomi Wilayah Untuk Arahan Pembangunan Kecamatan di Wilayah Pesisir Kabupaten Garut*. Jurnal Ilmiah Geomatika, 19(2): 134-140.
- Utina, Ramli et al. (2018). *Ekosistem Dan Sumber Daya Alam Pesisir Penerapan Pendidikan Karakter Konservasi*. Yogyakarta: Budi Utama.